LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
TRIWULAN II

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi atau unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
   1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
   1. Seksi Tata Lingkungan;
   2. Seksi Pengkajian Lingkungan; dan
   3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Lirnbah B3, membawahi :
   1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
   2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3; dan
   3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, membawahi :
   4. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
   5. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
   6. Seksi Perubahan Iklim;

f. Bidang Penegakan Hukurn, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
   1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;

2. Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan; dan
3. Seksi Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat.

g. Bidang Pertanahan, membawahi :
1. Seksi Pengadaan Tanah;
2. Seksi Dokumentasi Pertanahan; dan
3. Seksi Perizinan Pertanahan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 - 2029 adalah sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu: **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA".**

C. Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur.

Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu: **"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah dan Kehutanan".**

D. Belanja, Program APBD

Total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II yang bersumber dari APBD Tahun 2026 adalah sebesar Rp.45.027.391.979,00 yang terdiri atas :

1. Total Pagu OPD : Rp. 19.259.231.979,00
2. Total Pagu BLUD : Rp. 25.768.160.000,00

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD Tahun 2026 terdiri dari sebagai berikut :

Pagu APBD Rp. 19.259.231.979,00

Pagu BLUD Rp. 25.768.160.000,00

- Belanja Operasi : **Rp. 41.027.391.979,00,-**
- Belanja modal : **Rp. 4.000.000.000,-**
- Belanja tidak terduga : -
- Belanja transfer : -

E. Program dan Anggaran APBD

Terdapat 16 (enam belas) program kegiatan APBD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan program dan rincian anggaran antara lain sebagai berikut :

Tabel 1

Program kegiatan APBD

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	62.405.357,00
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.630.670,00
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	42.436.581,00
4.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	38.389.909,00
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	43.396.000,00
6.	Program Penatagunaan Tanah	26.790.000,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.477.544.281,50
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	14.760.000,00
9.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	800.496.520,00
10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	18.570.000,00
11.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan	17.590.000,00

	Beracun B3 dan Limbah B3	
12.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup (PPLH)	79.233.314,00
13.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	43.069.875,00
14.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	200.224.249,50
15.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	49.284.222,00
16.	Program Pengelolaan Persampahan	89.571.000,00
	Total	**45.027.391.979,00**

F. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2

Target Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada RENSTRA 2025- 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.69	68,19	68,44	68,70	68,95	69,20
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	95	95
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	19,41	20,52	21,77	22,87
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,2	31,02	34,50	39,97	45,01	44,59

5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	n/a	45	52	52,5	53	53,5
6	Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pegolah sampah(%)	%	n/a	21	21,5	23	25	35
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	%	n/a	43	44	45	46	62

Tabel 3

Realisasi Capaian Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tahun 2025 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2024	Target 2025	Realisai 2025	Target 2026	Realisasi 2026 (TW II)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72.69	68,19	75,15	68,44	n/a
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	%	n/a	95	95	95	n/a
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	n/a	18,50	n/a	19,41	n/a
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	20,2	31,02	32	34,50	n/a
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	n/a	45	16	52	n/a
6	Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di	%	n/a	21	8	21,5	n/a

	fasilitas pegolah sampah(%)						
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	%	n/a	43	-	44	n/a

**N/A = Data capaian realisai di didapatkan diakhir tahun dan setelah tahun berjalan*

G. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tersebar di beberapa lokasi dan setiap kegiatan dapat mencakup hampir seluruh 17 Kabupaten/kota di Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2) Pengelolaan Sampah Regional;
3) Pengendalian Karhutla;
4) Program Kampung Iklim (ProKlim);
5) Inventarisasi dan Penurunan Emisi GRK;
6) Penyusunan RPPLH dan KLHS;
7) Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
8) Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup;
9) Laboratorium Lingkungan Hidup Regional;
10) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota.

H. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan masukan SKPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

a. Maksud

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah untuk memastikan target rencana program dan kegiatan pembangunan dapat dicapai melalui penilaian hasil pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah agar realisasi kegiatan yang telah ditetapkan tercapai sesuai Renstra.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TA 2026

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II TA 2026 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut:

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan:

Tabel 4

Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	**45.027.391.979,00**	**16.970.566.954,00**	**40**	**37,69**	**45**	**54,59**
Belanja Operasi	**41.027.391.979,00**	**14.736.159.847,00**	**40**	**35,92**	**45**	**57,96**
Belanja Modal	**4.000.000.000,00**	**367.683.500,00**	**40**	**9,19**	**45**	**20**
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

Sumber: DPA DLHP Prov. Sumatera Selatan

Realisasi Keuangan Total Belanja DLHP Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Triwulan II TA 2026 sebesar **Rp. 16.970.566.954,00** atau **37,69%** dan realisasi fisik **54,59 %.**

Tabel 5

Realisasi Total Belanja

No	Interval Nilai Realisasi Terhadap Target	Kriteria Penilaian Realisasi	Status Realisasi	Keterangan
1	90 % ≤ 100 %	Tinggi	Hijau	
2	66 % ≤ 90 %	Sedang	Kuning	
3	0 % ≤ 65 %	Rendah	Merah	

III. Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6

Indikator dan Target Kinerja Kunci Tahun 2025 - 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat daerah	%	99,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	59,54	75,48	75,68	75,88	76,08	76,28	76,48	
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,25	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	
10	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	44,52	68,42	68,49	68,56	68,63	68,7	68,77	
11	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	79,71	70,48	70,53	70,58	70,63	70,68	70,73	
12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	Indeks	n/a	0,465	0,469	0,473	0,477	0,482	0,486	Indikator baru
13	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	
15	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Renstra DLHP Prov. Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 7

Indikator dan Target Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi Fisik 2026 (TW II)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	%	100%	99%	100%	72%
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui medias	%	100%	99%	100%	45%
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100%	98%	100%	52%
4	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%	100%	99%	100%	42,5%
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	100%		100%	72%
6	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat daerah	%	100%	99,68 %	100%	41%
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100%		100%	52%
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	75,48	72,87	75,68	n/a
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	61,8	78,26	62,2	n/a
10	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	68,42	68,85	68,49	n/a
11	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	indeks	70,48	78,24	70,53	n/a
12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)	indeks	0,465	0,465	0,469	n/a
13	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100%	100%	100%	80%
14	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	17%	17%	17%	n/a%
15	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100 %	100 %	30%
16	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100%	100 %	100 %	59,8%
17	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100%	100%	100 %	60%

**n/a : Belum dapat diketahui*
Sumber: DLHP Prov. Sumatera Selatan

IV. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

1. (SIPP-LINK SUMSEL) dan Ancer on the Spot (Anti Cemar on the Spot) Piagam penghargaan dari kepala lembaga administrasi negara Nomor 936/K.1/PDP.09 Tanggal 16 November 2019.
2. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 atas Program Kampung Iklim 2022 Kategori Pembina Proklim Tingkat Provinsi
3. Perhargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir **(BAPETEN)** Kepada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keselamatan dan Keamanan Nuklir dengan kegiatan Pengukuran dan Analisa Tahun 2022
4. Sistem Data dan Informasi Ekosistem Gambut (Si-Gambut) Nominasi Penghargaan Bhumandala – Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Tahun 2023.
5. Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 17 Oktober 2023
6. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Tanggal 23 Oktober 2023
7. Penghargaan Kategori Terinovasi atas Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dari Gubernur Sumatera Selatan pada Bulan November 2023.
8. Penghargaan Pembinaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Agustus 2024.
9. Penghargaan Adi Niti dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kategori Laboratorium Pemerintah dengan Ruang Lingkupnya Lengkap dan Taat dalam Perpanjangan Registrasi tanggal 10 September 2024.
10. Penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada 1 Desember 2025.

V. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi adalah:

1. APBD:

   Terdapat Indikator Kinerja yang tidak dapat terlaksana yakni pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan KKPR harus dilaksanakan melalui sistem OSS, akan tetapi terdapat keterbatasan pada sistem OSS dalam penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

2. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

   Sebagian pelaku usaha masih belum tertib dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL dan UKL-UPL). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses evaluasi serta Masih terdapat pelaku usaha/kegiatan yang belum menyusun dokumen lingkungan atau belum melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin, serta keterbatasan SDM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. menghambat pencapaian indikator kepatuhan lingkungan.

3. Pengelolaan Sampah

   Masyarakat di beberapa wilayah prioritas masih memiliki kesadaran rendah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini berdampak pada tingginya timbulan sampah liar, rendahnya partisipasi rumah tangga dalam pemilahan sampah, dan peningkatan beban pada TPA.

4. Pengelolaan Pertanahan

   Beberapa proses penataan dan penyelesaian sengketa pertanahan terkendala oleh kurang lengkapnya dokumen kepemilikan atau peta dasar pertanahan. Akibatnya, penyelesaian konflik atau verifikasi lapangan memerlukan waktu lebih lama dari target kinerja.

b. Tindak lanjut:

1. APBD

Agar dilakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi (DPUBMTR, DPMPTSP Prov. Sumsel) dan pemerintah pusat terkait keterbatasan sistem OSS untuk penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi

2. **Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)**

   Melakukan pembinaan rutin dan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan RKL-RPL/UKL-UPL, termasuk penyediaan layanan konsultasi teknis dan pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan, serta mendorong kepatuhan dalam penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Pengelolaan Sampah**

   Mengintensifkan kampanye dan edukasi pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sekolah, komunitas, dan perangkat desa/kelurahan.

4. **Pengelolaan Pertanahan**

   Melakukan koordinasi dengan BPN, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian sengketa serta melengkapi dokumen pendukung penataan batas atau pemanfaatan ruang.

VI. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sumber APBD pada Triwulan II TA 2026, untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 07 Juli 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Herdi Apriansyah,S.STP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197604251994121001

LAPORAN MINGGUAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JUNI S.D. 30 JUNI TAHUN ANGGARAN 2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR	KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SUMBER PENDANAAN (APBD/DAK FISIK DAN NON FISIK)	LOKASI	TEMATIK	FAKTOR PENGHAMBAT /PENDORONG
								(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15
	2.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN												
1	2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu				62.405.357,00	44.510.520,00	71,32	72,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan				62.405.357,00	44.510.520,00	71,32	72,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.03.1.01.0003	- Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	2		62.405.357,00	44.510.520,00	71,32	72,00	APBD	Sumatera Selatan		
		Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen data rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra,RKPD,DIPA)	Dokumen	1		32.405.357,00	26.142.320,00	80,67	82,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Tanah	Dokumen	1		30.000.000,00	18.368.200,00	61,23	62,00	APBD	8 Kab/Kota (Kab. OKUS, Kab. OKUT, Kab. OKI, Kab. OI, Kab. ME, Kab. Prabumulih, Kab. MUBA, Kab. Banyuasin)		
2	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi				23.630.670,00	255.000,00	1,08	45,00	APBD	4 Kab/Kota (MURA, MURATARA, ME, LAHAT)		
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi				23.630.670,00	255.000,00	1,08	45,00	APBD	4 Kab/Kota (MURA, MURATARA, ME, LAHAT)		
	2.10.04.1.01.0006	- Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	2		23.630.670,00	255.000,00	1,08	45,00	APBD	4 Kab/Kota (MURA, MURATARA, ME, LAHAT)		
3	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				42.436.581,00	18.954.000,00	44,66	52,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi				42.436.581,00	18.954.000,00	44,66	52,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.05.1.01.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1		15.336.592,00	10.764.000,00	70,19	72,00	APBD	Kab/Kota dalam Prov. Sumsel		
	2.10.05.1.01.0002	- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	1		15.949.841,00	8.190.000,00	51,35	54,00	APBD	Palembang		
	2.10.05.1.01.0003	- Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	1		11.150.148,00	-	0,00	30,00	APBD	Palembang		
		Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah Laporan Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Laporan	1		11.150.148,00	-	0,00	30,00	APBD	Palembang		

4	**2.10.06**	**Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**				**38.389.909,00**	**2.680.000,00**	**6,98**	**58,67**	**APBD**	**Sumatera Selatan**		
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				38.389.909,00	2.680.000,00	6,98	58,67	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.06.1.01.0002	- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		12.409.986,00	2.680.000,00	21,60	48,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.06.1.01.0003	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1		13.569.937,00	-	0,00	56,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.10.06.1.01.0005	- Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	1		12.409.986,00	-	0,00	72,00	APBD	Sumatera Selatan		
5	**2.10.08**	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**	**Persentase Tanah Kosong yang dikelola**				**43.396.000,00**	**10.456.000,00**	**24,09**	**42,50**	**APBD**	**Dalam Provinsi dan Luar Daerah**		
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya penyelesaian tanah kosong				21.536.000,00	2.836.000,00	13,17	40,00	APBD	Dalam Provinsi dan Luar Daerah		
	2.10.08.1.01.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	Laporan	1		21.536.000,00	2.836.000,00	13,17	40,00	APBD	Dalam Provinsi dan Luar Daerah		
	2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong				21.860.000,00	7.620.000,00	34,86	45,00	APBD	Dalam Provinsi dan Luar Daerah		
	2.10.08.1.02.0001	- Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam 1	Laporan	1		21.860.000,00	7.620.000,00	34,86	45,00	APBD	Dalam Provinsi dan Luar Daerah		
6	**2.10.10**	**Program Penatagunaan Tanah**	**Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah**				**26.790.000,00**	**16.980.000,00**	**63,38**	**72,00**	**APBD**	**Dalam Provinsi dan Luar Daerah**		
	2.10.10.1.01	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				26.790.000,00	16.980.000,00	63,38	72,00	APBD	Dalam Provinsi dan Luar Daerah		
	2.10.10.1.01.0002	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan	Dokumen	1		26.790.000,00	16.980.000,00	63,38	72,00	APBD	Dalam Provinsi dan Luar Daerah		
	2.11	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**												
7	**2.11.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**1. Persentase Dokumen PEP yang tersusun 2. Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun 3. Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana 4. Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana**				**43.477.544.281,50**	**16.502.290.364,00**	**37,96**	**41,08**	**APBD**	**Prov. Sumsel**		
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				188.000.000,00	90.845.896,00	48,32	60,86	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1		16.000.000,00	14.173.860,00	88,59	78,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Dokumen	1		16.000.000,00	14.173.860,00	88,59	78,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.01.0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4		72.000.000,00	15.936.229,00	22,13	41,75	APBD	Prov. Sumsel		
		Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Laporan	1		20.000.000,00		#VALUE!	47,00	APBD	Prov. Sumsel		

		Koordinasi dan Penyusunan LPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan	1		20.000.000,00	12.167.496,00	60,84	60,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Koordinasi dan Penyusunan LKPJ	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Laporan	1		16.000.000,00	1.819.986,50	11,37	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Koordinasi dan Penyusunan LKjIP	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Laporan	1		16.000.000,00	1.948.746,50	12,18	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2		100.000.000,00	60.735.807,00	60,74	62,82	APBD	Sumatera Selatan		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	Laporan	1		60.000.000,00	57.383.780,00	95,64	95,64	APBD	17 Kab/Kota		
		Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan	1		40.000.000,00	3.352.027,00	8,38	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.830.011.320,00	7.235.960.121,00	45,71	53,33	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	140	1 Bulan (120 orang)	15.701.563.320,00	7.168.913.881,00	45,66	60,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan	OB	61	1 Bulan (61 orang)	6.114.620.762,00	2.952.990.606,00	48,29	60,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Gaji dan Tunjangan PPPK	Jumlah PPPK yang menerima Gaji dan Tunjangan	OB	59	1 Bulan (59 orang)	3.501.090.558,00	1.585.078.864,00	45,27	60,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Tambahan Penghasilan ASN	Jumlah PNS yang menerima Tambahan Penghasilan	OB	61	1 Bulan (61 orang)	6.085.852.000,00	2.630.844.411,00	43,23	60,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.02.0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1		98.448.000,00	60.470.000,00	61,42	70,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1		98.448.000,00	60.470.000,00	61,42	70,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.02.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1		30.000.000,00	6.576.240,00	21,92	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada				3.585.000,00	-	0,00	33,33	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.03.0001	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		1.195.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.03.0005	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1		1.195.000,00	-	0,00	25,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.03.0006	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1		1.195.000,00	-	0,00	25,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.368.782,00	-	0,00	15,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.05.0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2		20.368.782,00	-	0,00	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	Jumlah Dokumen ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	Dokumen	1		5.559.000,00	-	0,00	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Dokumen	1		14.809.782,00	-	0,00	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.05.0009	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7		60.000.000,00	-	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang	6		30.000.000,00	-	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat PIM	Orang	1		30.000.000,00	-	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				459.611.783,50	150.993.883,00	32,85	39,49	APBD	Prov. Sumsel		

	2.11.01.1.06.0001	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1		4.800.000,00	-	0,00	10,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0002	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3		31.232.000,00	-	0,00	38,33	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Paket	1		17.232.000,00	-	0,00	90,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	Paket	1		12.000.000,00	-	0,00	25,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Plakat/ Souvenir	Jumlah Plakat dan Souvenir yang disediakan	Paket	1		2.000.000,00	-	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2		62.000.000,00	11.175.000,00	18,02	75,40	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Makanan dan Minuman yang disediakan	Paket	2		62.000.000,00	11.175.000,00	18,02	75,40	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0005	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2		10.000.000,00	-	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0006	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		10.000.000,00	3.644.200,00	36,44	52,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2		272.245.283,50	132.824.683,00	48,79	44,30	APBD	Prov. Sumsel		
		Perjalanan Dinas Rutin Kantor	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Rutin Kantor	Laporan	1		253.354.131,50	132.824.683,00	52,43	53,60	APBD	Prov. Sumsel		
		Rapat Koordinasi Teknis	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Teknis	Laporan	1		18.891.152,00	-	0,00	35,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		9.334.500,00	3.350.000,00	35,89	35,89	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.06.0011	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1		60.000.000,00	-	0,00	60,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya berbagai jasa pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti jasa kebersihan, jasa transportasi, jasa komunikasi, listrik dan air, serta jasa keamanan				923.447.396,00	250.671.228,00	27,15	52,16	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.08.0001	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		2.000.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1		307.089.396,00	94.466.228,00	30,76	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.08.0003	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1		1.600.000,00	-	0,00	53,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3		612.758.000,00	156.205.000,00	25,49	55,64	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Gaji PPPK Paruh Waktu	Jumlah Gaji PPPK Paruh Waktu	OB	10		341.510.000,00	149.075.000,00	43,65	70,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	Laporan	1		250.000.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah Laporan Jasa Tutor SKJ yang disediakan	Laporan	1		7.680.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel yang disediakan	Laporan	1		13.568.000,00	7.130.000,00	52,55	52,55	APBD	Prov. Sumsel		

	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah BMD yang dipelihara, yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti kondisi teknis aset, masa pakai aset, dan efektivitas pemeliharaan				224.360.000,00	2.593.175,00	1,16	40,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.09.0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7		12.000.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.09.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31		108.360.000,00	2.593.175,00	2,39	80,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50		24.000.000,00	-	0,00	30,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.09.0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		80.000.000,00	-	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan keuangan,				25.768.160.000,00	8.771.226.061,00	34,04	34,50	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.01.1.10.0001	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Unit Kerja	1		25.768.160.000,00	8.771.226.061,00	34,04	34,50	APBD	Prov. Sumsel		
8	**2.11.02**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti**				**14.760.000,00**	**6.360.000,00**	**43,09**	**52,00**	**APBD**	**Prov. Sumsel**		
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis				14.760.000,00	6.360.000,00	43,09	52,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.02.1.02.0009	- Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	Dokumen	1		14.760.000,00	6.360.000,00	43,09	52,00	APBD	Prov. Sumsel		
9	**2.11.03**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Lahan 4. Indeks Kualitas Air Laut 5. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif 6. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan**				**800.496.520,00**	**236.209.070,00**	**29,51**	**49,48**	**APBD**	**Sumatera Selatan**		
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksanannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup				459.102.385,00	97.984.000,00	21,34	31,99	APBD	Sumatera Selatan		
	2.11.03.1.01.0001	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,	Dokumen	3		76.226.000,00	12.724.000,00	16,69	37,33	APBD	Prov. Sumsel		
		Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	Jumlah Dokumen Uji Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan yang disusun	Dokumen	1		31.040.000,00	6.840.000,00	22,04	47,00	APBD	6 Kab/Kota (Kab ME, Kab Lahat, Kab MURATARA, Kab MUBA, Kab Banyuasin, dan Kab OKU)		
		Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan	Jumlah Dokumen Uji Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH	Dokumen	1		19.772.000,00	5.884.000,00	29,76	35,00	APBD	17 Kab/Kota		
		Pembinaan dan Monitoring Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	Jumlah Dokumen Uji Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	Dokumen	1		25.414.000,00	-	0,00	30,00	APBD	17 Kab/Kota		
	2.11.03.1.01.0002	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor	Dokumen	5		164.245.000,00	19.550.000,00	11,90	29,40	APBD	Sumatera Selatan		
		Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1		60.325.000,00	18.410.000,00	30,52	47,00	APBD	17 Kab/Kota		

		Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Bahan Perusak Ozon dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1		90.000,00	-	0,00	0,00	APBD	2 Kab/Kota (Kota Palembang dan Kota Prabumulih)		
		Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1		33.830.000,00	-	0,00	5,00	APBD	6 Kab/Kota (Kab. ME, Kab. MUBA, Kab. OKI, Kab. Lahat, Kab. Banyuasin dan Kab. OKU)		
		Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	Jumlah Dokumen Hasil Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan yang dilaksanakan	Dokumen	1		20.000.000,00	-	0,00	5,00	APBD	11 Kab/Kota (Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MUBA, Kab ME, Kab PALI, Kab MURATARA, Kab MURA, Kab OI, Kab OKU, Kab OKUT, Kab Lahat, dan OKUS)		
		Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi yang dilaksanakan	Dokumen	1		50.000.000,00	1.140.000,00	2,28	90,00	APBD	11 Kab/Kota (Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MUBA, Kab ME, Kab PALI, Kab MURATARA, Kab MURA, Kab OI, Kab OKU, Kab OKUT, Kab Lahat, dan OKUS)		
	2.11.03.1.01.0004	- Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	242		99.864.000,00	6.000.000,00	6,01	19,33	APBD	17 Kab/Kota		
		Pengujian Parameter Analisa Air Laut	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter Analisa Air Laut yang dilaksanakan	Paket	20		14.700.000,00	-	0,00	5,00	APBD	2 Kab/Kota (Banyuasin, OKI)		
		Pengujian Parameter Kualitas Udara	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter Kualitas Udara yang dilaksanakan	Paket	34		4.080.000,00	-	0,00	5,00	APBD	17 Kab/Kota		
		Pengujian Parameter Kualitas Air Sungai	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter Kualitas Air yang dilaksanakan	Paket	188		81.084.000,00	6.000.000,00	7,40	48,00	APBD	17 Kab/Kota		
	2.11.03.1.01.0009	- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	179		118.767.385,00	59.710.000,00	50,27	41,88	APBD	17 Kab/Kota		
		Pemantauan Kualitas Air Sungai	Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi yang Dilaksanakan	Lokasi titik sampling	91		65.878.000,00	59.710.000,00	90,64	90,64	APBD	17 Kab/Kota		
		Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi yang Dilaksanakan	Lokasi titik sampling	68		44.743.635,00	-	0,00	30,00	APBD	17 Kab/Kota		
		Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi yang Dilaksanakan	Lokasi titik sampling	20		8.145.750,00	-	0,00	5,00	APBD	2 Kab/Kota (Banyuasin, OKI)		
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				27.633.000,00	23.892.800,00	86,46	86,46	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.03.1.02.0001	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Laporan	1		27.633.000,00	23.892.800,00	86,46	86,46	APBD	Prov. Sumsel		
		Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	Laporan	1		27.633.000,00	23.892.800,00	86,46	86,46	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				313.761.135,00	114.332.270,00	36,44	30,00	APBD	Sumatera Selatan		

	2.11.03.1.03.0006	- Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	2		313.761.135,00	114.332.270,00	36,44	30,00	APBD	7 Kab/Kota (OKI, MUBA, Banyuasin, MURA, MURATARA, PALI, Muara Enim)		
		Pendampingan Tim Restorasi Gambut	Jumlah Kegiatan Pendampingan Tim Restorasi Gambut yang dilaksanakan	kegiatan	1		301.411.135,00	114.332.270,00	37,93	45,00	APBD	7 Kab/Kota (Kab MUBA, Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MURA, Kab MURATARA, Kab ME dan Kab PALI)		
		Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi	Jumlah Kegiatan Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi yang dilaksanakan	kegiatan	1		12.350.000,00	-	0,00	15,00	APBD	7 Kab/Kota (Kab MUBA, Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MURA, Kab MURATARA, Kab ME dan Kab PALI)		
10	**2.11.04**	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)**				**18.570.000,00**	**1.920.000,00**	**10,34**	**31,00**	**APBD**			
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				18.570.000,00	1.920.000,00	10,34	31,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.11.04.1.01.0004	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	5		7.725.000,00	-	0,00	42,00	APBD	Jakabaring Sport Centre		
	2.11.04.1.01.0006	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	20		10.845.000,00	1.920.000,00	17,70	20,00	APBD	DLHP Provinsi Sumsel		
11	**2.11.05**	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**				**17.590.000,00**	**13.820.000,00**	**78,57**	**80,00**	**APBD**			
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				17.590.000,00	13.820.000,00	78,57	80,00	APBD			
	2.11.05.1.01.0002	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1		17.590.000,00	13.820.000,00	78,57	80,00	APBD	Kab/Kota		
12	**2.11.06**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**				**79.233.314,00**	**17.100.000,00**	**21,58**	**80,00**	**APBD**			
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				79.233.314,00	17.100.000,00	21,58	80,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.11.06.1.01.0006	- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	10		79.233.314,00	17.100.000,00	21,58	80,00	APBD	17 Kab/Kota		
13	**2.11.08**	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya**				**43.069.875,00**	**-**	**0,00**	**30,00**	**APBD**	**Prov. Sumsel**		

	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				43.069.875,00	-	0,00	30,00	APBD			
	2.11.08.1.01.0003	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	15		6.364.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup				6.364.000,00	-	0,00	50,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.08.1.01.0005	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Orang	15		15.446.000,00	-	0,00	20,00	APBD	Prov. Sumsel		
		Pelatihan Diklat dan Bimbingan Teknis Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo	Orang	15		15.446.000,00	-	0,00	20,00	APBD	Prov. Sumsel		
	2.11.08.1.01.0007	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan	Dokumen	1		21.259.875,00	-	0,00	20,00	APBD	Kora Palembang		
		Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	Jumlah Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru yang dilaksanakan	Dokumen	1		21.259.875,00	-	0,00	20,00	APBD	Kora Palembang		
14	**2.11.09**	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup**				**200.224.249,50**	**50.703.000,00**	**25,32**	**59,88**	**APBD**	**17 Kab/Kota**		
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi				200.224.249,50	50.703.000,00	25,32	59,88	APBD	17 Kab/Kota		
	2.11.09.1.01.0001	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang	Entitas	4		200.224.249,50	50.703.000,00	25,32	59,88	APBD	17 Kab/Kota		
		Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah Kab/Kota yang menerima Penghargaan Adipura	Kab/Kota	3		32.416.700,00	8.910.000,00	27,49	27,49	APBD	17 Kab/Kota		
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Dunia Pendidikan/ Sekolah Adiwiyata yang Dinilai	Sekolah	35		44.925.000,00	21.630.000,00	48,15	80,60	APBD	17 Kab/Kota		
		Monitoring dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri yang di Evaluasi dan di Monitoring	Sekolah	30		19.999.549,50	-	0,00	80,60	APBD	17 Kab/Kota		
		Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	Jumlah Perusahaan Yang Dinilai	Perusahaan	135		29.995.000,00	4.538.000,00	15,13	20,00	APBD	8 Kab/Kota (Kota Palembang, Kab. MUBA, Kab. MURATARA, Kab. MURA, Kab. OI, Kab. OKI, Kab. PALI, Kab. Lahat)		
		Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Yang Dinilai	orang	1		15.130.000,00	7.000.000,00	46,27	80,60	APBD	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan		
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD Yang Disusun	dokumen	1		57.758.000,00	8.625.000,00	14,93	70,00	APBD	Prov. Sumsel		
15	**2.11.10**	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**				**49.284.222,00**	**17.655.000,00**	**35,82**	**60,00**	**APBD**	**Sumatera Selatan**		
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi				49.284.222,00	17.655.000,00	35,82	60,00	APBD	Sumatera Selatan		
	2.11.10.1.01.0007	- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Pengaduan	6		49.284.222,00	17.655.000,00	35,82	60,00	APBD	17 Kab/Kota		

16	**2.11.11**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**1. Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS) 2. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**				**89.571.000,00**	**30.674.000,00**	**34,25**	**47,90**	**APBD**	**Sumatera Selatan**		
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				89.571.000,00	30.674.000,00	34,25	47,90	APBD	Sumatera Selatan		
	2.11.11.1.01.0010	- Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah regional	Dokumen	1		25.775.000,00	-	0,00	25,00	APBD	17 Kab/Kota		
	2.11.11.1.01.0014	- Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1		63.796.000,00	30.674.000,00	48,08	70,80	APBD	17 Kab/Kota		
		Total					**45.027.391.979,00**	**16.970.566.954,00**	**37,69**	**54,59**				

Palembang, 3 Juni 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HERDI APRIANSYAH, S.STP.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197604251994121001